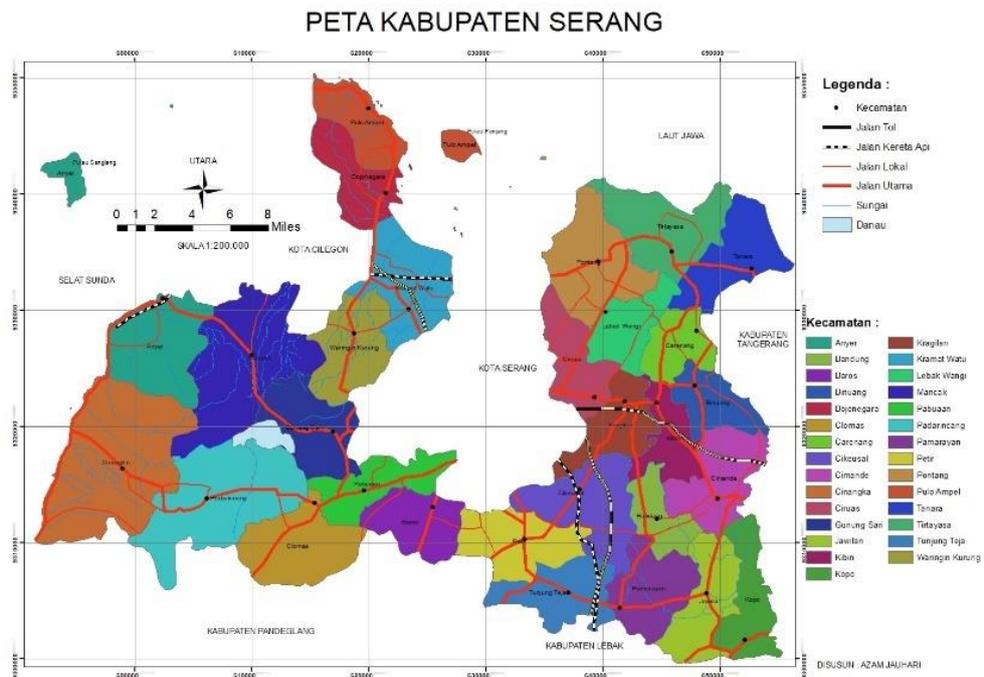


BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Serang

Kabupaten Serang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Letaknya strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Sunda di sebelah barat laut, menjadikannya gerbang utama menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak.



Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Serang

Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Serang antara lain, Sebelah utara: Laut Jawa dan Kota Cilegon, sebelah timur: kabupaten Tangerang dan provinsi DKI Jakarta (tidak langsung tapi berdekatan). Sebelah selatan: Kabupaten lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sebelah Barat : Selat Sunda dan Kota Cilegon.

Adapun Titik Koordinatnya: Secara umum terletak antara 5^o50'-6^o21' Lintang Selatan dan 105^o46'-106^o22' Bujur Timur. Adapun luas wilayah Kabupaten Serang adalah sekitar 1734,28 km².

Jumlah kecamatan di Kabupaten Serang terdiri dari 29 kecamatan dengan 318 desa. Masing-masing kecamatan memiliki ciri khas dan potensi alam yang berbeda-beda, antara lain pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Tabel 4.1

Kecamatan, Luas, serta Jumlah Desa di Kabupaten Serang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa
1	Anyar	56,81	12
2	Bandung	25,18	8
3	Baros	44,07	14
4	Binuang	26,17	7
5	Bojonegara	30,3	11
6	Carenang	32,8	8
7	Cikande	50,53	13
8	Cikeusal	88,25	17
9	Cinangka	111,47	14
10	Ciomas	48,53	11
11	Ciruas	34,49	15
12	Gunungsari	48,6	7
13	Jawilan	38,95	9
14	Kibin	33,51	9
15	Kopo	44,69	10
16	Kramatwatu	48,59	15
17	Kragilan	36,33	12
18	Lebak Wangi	31,73	10
19	Mancak	74,03	14

20	Padarincang	99,12	11
21	Pabuaran	79,14	8
22	Pamarayan	41,92	10
23	Petir	46,94	10
24	Pontang	58,09	11
25	Pulo Ampel	32,56	9
26	Tanara	49,3	9
27	Tirtayasa	64,46	14
28	Tunjung Teja	39,52	9
29	Waringin Kurung	51,29	11
	Total	1467,37	318

Sumber BPS Kabupaten Serang 2024

Topografi dan Ketinggian wilayah kabupaten serang sebagai berikut, dataran rendah : Sebagian besar wilayah Kabupaten Serang adalah dataran rendah yang membentang dari pantai utara hingga ke selatan. Wilayah ini umumnya didominasi oleh lahan pertanian, permukiman, dan industri. Perbukitan: Terdapat beberapa wilayah perbukitan di bagian selatan dan tenggara, yang merupakan bagian dari rangkaian perbukitan di Banten. Ketinggiannya tidak terlalu signifikan dibandingkan pegunungan di wilayah lain. Pesisir: Memiliki garis pantai yang cukup panjang di bagian utara dan barat, berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Sunda. Wilayah pesisir ini dimanfaatkan untuk perikanan, pelabuhan (Merak), dan pariwisata (pantai-pantai). (BPS Kabupaten Serang, 2023)

Sumber Daya Alam di Kabupaten serang diantaranya, pertanian: Lahan subur di dataran rendah sangat cocok untuk pertanian padi, palawija, dan hortikultura. Perikanan: Potensi perikanan laut di sepanjang pesisir utara dan barat sangat besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Pertambangan: Terdapat beberapa potensi pertambangan non-logam seperti pasir, batu, dan bahan galian

lainnya. **Potensi Wisata:** Pantai, pulau-pulau kecil di sekitar pesisir (misalnya Pulau Sangiang), serta situs-situs bersejarah (seperti Banten Lama di Kota Serang, yang berbatasan dekat) menjadi potensi pariwisata. (BPS Kabupaten Serang, 2023)

Secara sosiologis, Kabupaten Serang menunjukkan dinamika masyarakat yang menarik dengan percampuran antara tradisi lokal dan pengaruh modernisasi. **Demografi Kabupaten Serang antara lain:** **Jumlah Penduduk:** Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup padat di Banten. **Distribusi Penduduk:** Kepadatan penduduk cenderung lebih tinggi di wilayah utara yang dekat dengan pusat ekonomi (Kota Serang, Cilegon) dan kawasan industri, serta di sepanjang jalur utama. **Urbanisasi:** Ada kecenderungan urbanisasi ke wilayah-wilayah yang berkembang pesat akibat pertumbuhan industri dan perdagangan. (BPS Kabupaten Serang, 2023)

Adapun etnis dan budaya antara lain: **Mayoritas Sunda Banten:** Mayoritas penduduk asli Kabupaten Serang adalah suku Sunda dengan dialek dan adat istiadat khas Banten. Mereka dikenal memiliki religiusitas yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. **Pendatang:** Seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri, banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, terutama dari Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Sumatera, dan daerah lain di Banten, yang bekerja di sektor industri, jasa, atau perdagangan. Hal ini menciptakan masyarakat yang multikultural. **Adat dan Tradisi:** Meskipun modernisasi terus berkembang, tradisi dan adat istiadat lokal masih terpelihara, terutama di daerah pedesaan. Seni tradisional seperti debus, patingtung, dan pencak silat masih dapat ditemukan. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2023)

Mata pencaharian: penduduk kabupaten Serang antara lain: Pertanian, Sektor pertanian (padi, palawija, hortikultura) masih menjadi mata pencarian utama bagi sebagian besar penduduk di daerah pedesaan. Perikanan: Masyarakat pesisir mengandalkan perikanan sebagai sumber penghidupan. Industri: Sektor industri berkembang pesat di wilayah utara Kabupaten Serang, dengan banyak pabrik dan kawasan industri. Ini menyerap banyak tenaga kerja lokal maupun pendatang. Perdagangan dan Jasa: Sektor perdagangan dan jasa juga tumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi, terutama di pusat-pusat keramaian dan kota-kota kecil. Pariwisata: Sektor pariwisata mulai berkembang dan memberikan peluang mata pencarian bagi masyarakat sekitar objek wisata. (BPS Kabupaten Serang, 2024)

Bidang Kesehatan di Kabupaten Serang: Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit semakin tersedia, meskipun aksesibilitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan di beberapa wilayah. Secara keseluruhan, Kabupaten Serang adalah wilayah yang dinamis dengan potensi geografis yang besar (terutama maritim dan pertanian) serta masyarakat yang kaya akan budaya dan nilai-nilai lokal, namun juga terus beradaptasi dengan modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. (BPS Kabupaten Serang, 2023)

Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat seiring dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun, tantangan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan masih ada, terutama di daerah terpencil. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2023)

Tabel 4.2
Jumlah Minat Masyarakat Yang Mendaftar PKBM

Nama Satuan Pendidikan	Peserta Didik Laki-Laki	Peserta Didik Perempuan	PD_Total
PKBM ABASIYAH ALBY MAALY	85	65	150
PKBM AL FAJAR	94	41	135
PKBM AL FAUZAN	64	56	120
PKBM AL HIDAYAH	0	0	0
PKBM AL IRSYAD	158	127	285
PKBM AL MISBACH	329	237	566
PKBM AL WASIDIYAH	194	85	279
PKBM AL-A`RAAF	0	0	0
PKBM AL-BAROKAH	94	68	162
PKBM AL-FATHONI	0	0	0
PKBM AL-FATIH	108	60	168
PKBM AL-FIRDAUS	70	37	107
PKBM AL-KAHFI	143	95	238
PKBM AL-MAARIF	60	28	88
PKBM AL-UMMAH	63	38	101
PKBM ALBAB FOUNDATION	65	31	96
PKBM AMALUNA	32	30	62
PKBM AMANAH	236	155	391
PKBM AN NASHIRIYAH	70	42	112
PKBM AN-NADHIF	109	70	179
PKBM AN-NIDZOMIYAH	79	27	106
PKBM AN-NISA	8	17	25
PKBM ANUGRAH	78	40	118
PKBM ARYA SINGARAJA DAAR AS SABIL	0	0	0
PKBM ASHABUL KAHFI	135	62	197
PKBM ASSALAM	59	34	93
PKBM ASSHIFATY	62	19	81
PKBM ASSIDIQIAH	230	187	417
PKBM ASY-SYUKRIYAH	143	100	243
PKBM AULIA BILQIS	37	21	58
PKBM BAITUL MAKMUR	0	0	0
PKBM BAKTI WARGA	192	83	275
PKBM BANDUNG LESTARI	290	258	548
PKBM BANGUN BANGSA	23	16	39
PKBM BINA BANGSA	15	7	22
PKBM BINA MANDIRI	0	0	0
PKBM BINA NUSANTARA	140	75	215

PKBM BINA PRESTASI	0	0	0
PKBM BINA SEJAHTERA	11	1	12
PKBM BINA TARUNA SUKALABA	170	117	287
PKBM BINA WARGA	740	462	1202
PKBM BINA WARGA	99	94	193
PKBM BUNGA BANGSA	134	91	225
PKBM CAHAYA HATI	84	54	138
PKBM CAHAYA ILMU	179	140	319
PKBM DAAR EL HASANAH	54	40	94
PKBM EMAS PULO	55	18	73
PKBM GAPURA CENDIKIA	287	134	421
PKBM HARAPAN BARU	166	64	230
PKBM HIDAYAT FARHATUL JANNAH	80	54	134
PKBM IBU PERTIWI	95	57	152
PKBM INSAN BANTEN MADANI	95	52	147
PKBM INSAN MADANI	304	188	492
PKBM INSAN MULIA	49	28	77
PKBM KAMPUNG QURAN BONGBAK	29	22	51
PKBM KARYA ANAK BANGSA	93	45	138
PKBM KARYA MANDIRI SERANG	65	29	94
PKBM LIBERTY	277	138	415
PKBM LINTAS SABIT	139	57	196
PKBM MAHARANI	325	232	557
PKBM MAJU MANDIRI	89	92	181
PKBM MANBA'UL ITTIHAD	53	13	66
PKBM MANDIRI BERSAMA	133	97	230
PKBM MARIFATUL MUFIDATUS SOLIHIN	140	110	250
PKBM MIFTAHUL HUDA	66	47	113
PKBM MORINA 2	0	0	0
PKBM NUANSA ALAM	81	90	171
PKBM NUR ASSIDQI BANTEN	201	105	306
PKBM NUR ILLAHI	42	37	79
PKBM NURANI WARGA	69	54	123
PKBM NURUL HUDA	82	25	107
PKBM NURUL KHOIR	215	171	386
PKBM PELANGI DESA	174	93	267
PKBM PELITA BULAKAN	98	70	168
PKBM PENAL ILMU	242	138	380
PKBM PENCERAH ANAK BANGSA	12	7	19
PKBM PRATIWI	160	65	225
PKBM PRESTASI UNGGUL	150	100	250
PKBM PUYUH KONENG	110	71	181

PKBM SATRIA MUDA	0	0	0
PKBM SATU BANGSA	32	24	56
PKBM SEKAR	21	26	47
PKBM SHOFFUL ISLAM	210	154	364
PKBM SIMBA	9	7	16
PKBM SINAR PURNAMA	69	48	117
PKBM SRI MAKMUR	156	76	232
PKBM SUMBERDAYA	255	146	401
PKBM TUNAS HARAPAN BANGSA	80	55	135
PKBM UMMUL QURRO	342	175	517
PKBM WAHANA LESTARI	169	104	273
PKBM WIYATA BHAKTI	219	115	334
SKB KABUPATEN SERANG	235	126	361

Sumber: Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2024

Berdasarkan data Dapodik tahun 2024, minat masyarakat terhadap pendidikan non-formal di Kabupaten Serang terbukti sangat tinggi, dengan total 11.883 peserta didik tersebar di 92 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun, analisis lebih dalam menunjukkan adanya dua fenomena utama yang perlu menjadi perhatian. Pertama, terdapat ketidakseimbangan gender yang signifikan, di mana peserta didik laki-laki (63,1%) jauh mendominasi dibandingkan perempuan (36,9%). Kedua, terjadi disparitas skala yang ekstrem antar lembaga; beberapa PKBM unggulan seperti PKBM Bina Warga mampu menarik lebih dari seribu peserta, sementara sebagian besar lembaga lainnya berskala jauh lebih kecil. Kondisi ini, ditambah dengan adanya sekitar 8% PKBM yang tercatat tanpa peserta, mengindikasikan adanya polarisasi kapasitas dan tantangan pemerataan kualitas yang perlu ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk perencanaan yang lebih efektif. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Serang berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memberikan

pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. PKBM memiliki peranan penting dalam peningkatan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang terjangkau oleh pendidikan formal. Melalui berbagai program pendidikan, PKBM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan potensi individu. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2024)

PKBM di Kabupaten Serang menyediakan berbagai jenis pelatihan yang mencakup keterampilan praktis seperti kerajinan tangan, menjahit, dan pelatihan keterampilan teknis lainnya yang berbasis pada kebutuhan lokal. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PKBM sangat bermanfaat dalam membantu anak-anak dan remaja yang tidak melanjutkan pendidikan formal, serta orang dewasa yang membutuhkan keterampilan baru untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung ekonomi keluarga. Data menunjukkan bahwa pendidikan nonformal seperti yang diselenggarakan oleh PKBM telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keterampilan dan penciptaan peluang kerja bagi masyarakat di Kabupaten Serang.

Namun, meskipun PKBM memiliki peran yang sangat penting, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pendanaan dan dukungan dari pemerintah daerah, yang menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan program dan peningkatan kualitas pengajaran. Selain itu, kualitas tenaga pengajar di PKBM sering menjadi masalah, di mana tidak semua

pengajar memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di PKBM, diperlukan upaya peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga pengajar serta pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain fokus pada keterampilan, PKBM juga memiliki peran dalam pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial. Melalui program-program yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan workshop tentang etik dan hak-hak sipil, PKBM berkontribusi dalam pembentukan karakter dan kesadaran sosial masyarakat. Pendekatan ini penting bagi keberlangsungan masyarakat yang berpendidikan dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.

Secara keseluruhan, keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Serang memberikan harapan bagi masyarakat dalam mencapai pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan nonformal. Meskipun menghadapi tantangan, PKBM tetap berperan vital dalam memfasilitasi pendidikan bagi mereka yang membutuhkan, serta membangun masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing.

4.2. Analisis Data Penelitian

Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang menjadi upaya strategis untuk meningkatkan akses pendidikan inklusif bagi masyarakat yang terpinggirkan, termasuk kelompok putus sekolah, pekerja informal, dan komunitas pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap 25 peserta program (12 laki-laki, 13

perempuan), 8 tutor, 4 penyelenggara kursus, serta 3 pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Observasi lapangan dilakukan di beberapa kecamatan: Kragilan, Padarincang, dan Tanara, dengan fokus pada desa-desa yang memiliki angka putus sekolah tinggi seperti Barugbug, jeruk Tapis, dan Tenjoayu. Analisis dokumen seperti laporan keuangan, daftar peserta, dan catatan evaluasi program juga dilakukan untuk melengkapi temuan.

1. Fleksibilitas dan Kesenjangan Kurikulum

Program Kesetaraan di Kabupaten Serang mencatat partisipasi 1.600 peserta pada 2024, dengan 70% di antaranya berusia 15–35 tahun. Sebagian besar peserta berasal dari keluarga pra-sejahtera di sektor informal, seperti buruh tani (40%), pedagang kecil (30%), dan pekerja serabutan (30%). Wawancara dengan peserta di Desa Barugbug, Kecamatan Padarincang, mengungkap bahwa fleksibilitas waktu belajar malam hari menjadi daya tarik utama. Seorang peserta berusia 24 tahun yang bekerja sebagai pemetik teh di perkebunan menyatakan:

“Saya bisa ikut belajar setelah pulang kerja jam 5 sore. Tapi materi pelajarannya sering tidak nyambung dengan kebutuhan saya. Misalnya, diajari sejarah, tapi tidak diajari cara mengelola hasil panen atau hitung upah harian.”

Analisis modul pembelajaran menunjukkan bahwa 80% konten kurikulum masih mengadopsi sistem sekolah formal, seperti matematika dasar, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan sosial, sementara hanya 20% yang menyentuh keterampilan praktis seperti literasi finansial atau kewirausahaan. Hal ini menyebabkan tingkat penyelesaian program (completion rate) hanya mencapai

52%, dengan 48% peserta mengundurkan diri karena merasa materi tidak relevan.

Seorang tutor di Kecamatan Cinangka menjelaskan:

“Peserta sering bertanya, ‘Bu, ini untuk apa? Kami butuh ilmu yang bisa dipakai cari kerja, bukan menghafal tahun proklamasi.’ Sayangnya, kami terkendala aturan kurikulum pusat yang kaku.”

Di sisi lain, program ini berhasil menarik partisipasi perempuan di daerah pedesaan. Di Desa Tenjoayu, Kecamatan Tanara, 60% peserta Kesetaraan adalah perempuan yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan sekolah karena menikah dini.

Seorang peserta perempuan berusia 29 tahun mengungkapkan:

“Saya baru bisa belajar baca-tulis sekarang. Dulu orang tua bilang, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tapi setelah ikut Kesetaraan, saya bisa membantu anak-anak mengerjakan PR.”

2. Penurunan Angka Buta Huruf dan Tantangan Metodologi

Program Keaksaraan berhasil menurunkan angka buta huruf dewasa di Kabupaten Serang dari 8,1% (2023) menjadi 6,3% (2024), dengan partisipasi 850 peserta. Namun, kesenjangan gender masih mencolok: 78% peserta adalah perempuan, sementara laki-laki cenderung enggan terlibat karena stigma sosial.

Seorang tutor di Desa Panancangan, Kecamatan Taktakan, menceritakan:

“Banyak suami yang melarang istri ikut program, khawatir urusan rumah tangga terbengkalai. Tapi justru ibu-ibu ini yang paling rajin. Mereka ingin bisa baca Al-Qur’an atau hitung uang belanja.”

Metode pembelajaran yang digunakan dinilai terlalu konvensional. Observasi di Kelompok Belajar (Kejar) Paket A di Kecamatan Tanara menunjukkan bahwa 85% sesi belajar masih mengandalkan ceramah dan buku teks, tanpa alat peraga visual

atau teknologi. Peserta berusia lanjut (di atas 50 tahun) kesulitan memahami materi abstrak. Seorang peserta laki-laki berusia 55 tahun di Desa Pegadungan mengeluh:

“Saya ingin belajar menulis nama sendiri dan hitung uang, tapi malah disuruh menghitung volume tabung. Buat apa?”

Namun, inovasi lokal muncul di beberapa titik. Di Desa Tenjoayu tutor menggunakan permainan tradisional “gasing” untuk mengajarkan operasi matematika dasar. Pendekatan ini meningkatkan retensi peserta sebesar 35% dibanding metode ceramah. Seorang peserta perempuan berusia 55 tahun menyatakan:

“Dengan main gasing, saya jadi paham cara menghitung jumlah biji yang masuk lubang. Ini lebih mudah daripada lihat angka di papan tulis.”

3. Kursus dan Pelatihan: Antara Potensi dan Kendala Infrastruktur

Program kursus dan pelatihan di Kabupaten Serang fokus pada tiga bidang: (1) keterampilan digital (desain grafis, pemasaran online), (2) pertanian modern (hidroponik, budidaya lele sistem bioflok), dan (3) kerajinan tangan (anyaman bambu). Data partisipasi menunjukkan bahwa pelatihan pertanian modern paling diminati (500 peserta), diikuti keterampilan digital (400 peserta), dan kerajinan tangan (300 peserta). Di bidang pertanian, pelatihan budidaya lele sistem bioflok di Desa Barugbug, Kecamatan Padarincang, menunjukkan hasil positif. Peserta berhasil meningkatkan produktivitas dari 500 kg/kolam menjadi 800 kg/kolam setelah pelatihan. Namun, minimnya lahan percontohan menjadi kendala utama. Seorang peserta di Kecamatan Cinangka mengeluh:

“Kami diajari teori bioflok, tapi tidak ada kolam praktik. Akhirnya, saya coba sendiri di ember bekas, tapi gagal karena tidak ada pendampingan.”

Pada pelatihan keterampilan digital, keterbatasan infrastruktur menjadi penghambat. Sebanyak 80% peserta di Kecamatan Kragilan tidak memiliki laptop atau komputer pribadi. Pelatihan desain grafis di Sanggar Belajar Digital Serang hanya menyediakan 10 unit laptop untuk 50 peserta, sehingga praktik dilakukan secara bergantian. Seorang peserta berusia 22 tahun menyatakan:

“Saya cuma bisa praktik 30 menit per hari. Sudah seminggu ikut pelatihan, tapi masih belum bisa operasikan Photoshop.”

Di sektor kerajinan tangan, pelatihan anyaman di Desa Tegal Maja Kecamatan Kragilan berhasil meningkatkan kualitas produk, tetapi pemasaran masih terbatas. Seorang pengrajin batik mengungkapkan:

“Hasil pelatihan bagus, tapi kami kesulitan menjual. Pasar tradisional di sini tidak bisa menampung produk sebanyak ini. Kami butuh akses ke pameran atau e-commerce.”

4. Ketimpangan Geografis dan Partisipasi Kelompok Rentan

Ketimpangan geografis menjadi masalah krusial. Kecamatan pusat seperti Kragilan dan ciruas menyerap 60% anggaran program, sementara kecamatan yang jauh dari pusat kota seperti Tanara dan carenang hanya mendapat 40%. Di Desa Babakan, Kecamatan Padarincang, peserta harus menempuh jalan tanah sejauh 5 km untuk mencapai lokasi pelatihan. Seorang koordinator program mengakui:

“Banyak peserta mengundurkan diri karena jarak tempuh terlalu jauh. Kami pernah mengusulkan mobile training, tapi terkendala biaya transportasi.”

Partisipasi kelompok disabilitas juga masih sangat rendah (2% dari total peserta).

Seorang tunadaksa di Desa Tenjoayu menyatakan:

“Saya ingin ikut pelatihan anyaman bambu, tapi lokasinya tidak aksesibel. Tangga ke balai desa terlalu curam untuk kursi roda.”

5. Fragmentasi Koordinasi dan Hambatan Birokrasi

Koordinasi antar-pemangku kepentingan di Kabupaten Serang masih lemah.

Meskipun Dinas Pendidikan menjadi leading sector, kolaborasi dengan Dinas

Pertanian dan Dinas Koperasi UMKM belum optimal. Contohnya, pelatihan

pertanian modern tidak diikuti dengan pendampingan pasca-pelatihan atau akses

ke bibit unggul. Seorang peserta di Desa Tenjoayu menyatakan:

“Setelah pelatihan bioflok, kami tidak tahu harus beli probiotik di mana. Dinas Pertanian tidak memberikan informasi.”

Dalam hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam ekosistem pelatihan pasca-intervensi, di mana pelatihan tidak didukung oleh rantai dukung logistik atau informasi. Dalam kerangka implementasi kebijakan Grindle, hal ini menunjukkan lemahnya *linkage* antara isi kebijakan (*content*) dengan konteks lokal yang dibutuhkan peserta (*context*).

Proses penyerapan anggaran juga lambat. Keterlambatan ini disebabkan oleh

prosedur pengadaan barang/jasa yang rumit. Seorang bendahara program di

Kecamatan Ciruas mengeluh:

“Dana untuk pelatihan hidroponik baru cair bulan ke-6, padahal bahan harus dibeli di awal. Akhirnya, kami pakai dana desa, yang malah bikin masalah keuangan.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keterlambatan anggaran bukan hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaan, tetapi juga memicu konsekuensi administratif bagi desa. Ini mencerminkan lemahnya koordinasi vertikal antarpelaksana dan tumpang tindih regulasi penggunaan anggaran, sehingga membatasi fleksibilitas pelaksana lokal untuk berinovasi.

6. Dampak Sosial-Kultural

Stigma terhadap pendidikan non-formal masih kuat di masyarakat. Seorang orang tua di Desa Panancangan menolak mendaftarkan anaknya ke Kesetaraan dengan alasan:

“Ijazah paket tidak diakui di perusahaan. Lebih baik anak saya jadi buruh daripada dapat ijazah kelas dua.”

Pernyataan ini menegaskan adanya bias status sosial terhadap pendidikan kesetaraan. Dalam perspektif implementasi, ini merupakan bentuk *resistensi kultural* yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, terutama dari kelas bawah. Program yang bagus dari sisi teknis bisa gagal jika tidak disertai kampanye sosial untuk membangun legitimasi dan persepsi positif terhadap pendidikan non-formal.

Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam program masih dibatasi oleh norma patriarki. Seorang peserta perempuan di Desa jeruk Tipis mengungkapkan:

“Suami saya hanya mengizinkan ikut pelatihan jika pulang sebelum ashar. Padahal, kegiatannya biasanya sampai sore.”

Ungkapan ini memperlihatkan bahwa struktur gender masih membatasi ruang gerak perempuan dalam mengakses pendidikan. Ini menunjukkan pentingnya

gender lens dalam desain kebijakan. Tanpa pendekatan sensitif gender, intervensi kebijakan akan terus mengalami eksklusi terhadap kelompok yang seharusnya dilayani.

7. Potensi Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Di tengah tantangan, terdapat kisah sukses yang patut ditiru. Di Desa Cilowong, kelompok peserta pelatihan pertanian organik membentuk koperasi tani “Hijau Lestari” yang memasok sayuran ke pasar modern di Kabupaten Serang. Pendapatan anggota meningkat dari Rp 1,2 juta/bulan menjadi Rp 2,8 juta/bulan. Keberhasilan ini dipicu oleh pendampingan intensif dari penyuluh pertanian dan akses ke pembiayaan mikro melalui Bank Desa.

4.3. Pembahasan Hasil dan Temuan Penelitian

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu fokus utama dalam studi kebijakan, dan pemahaman mengenai tingkat keberhasilan implementasi tersebut menjadi sangat penting. Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, istilah "implementasi" tidak sekadar berkaitan dengan pelaksanaan dokumen kebijakan, tetapi lebih mendalam kepada bagaimana hasil dari kebijakan tersebut dapat diukur dan dievaluasi. Mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan ukurannya yang jelas dan realistis terhadap kondisi masyarakat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kontekstual terhadap sosio-kultural sangat penting dalam merancang kebijakan yang akan dilaksanakan.

Salah satu poin kunci dari teori tersebut adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan harus bersifat realistis agar dapat diterima dan dilaksanakan di tingkat masyarakat. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal atau bahkan utopis, kemungkinan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi akan menjadi lebih sulit. Dalam praktiknya, kebijakan yang baik harus mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan lokal, serta dinamika sosial yang sedang berlaku. Kekurangan dalam memahami konteks sosial ini dapat berakibat pada kesulitan dalam merealisasikan kebijakan yang ditetapkan.

Pada tingkat operasional, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan kecocokannya dengan kondisi yang ada pada pelaksana kebijakan. Kinerja implementasi yang berhasil tercermin dalam kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam yang mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga efektif dalam praktiknya, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian, dalam rangka mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik, pendekatan yang berbasis pada pemahaman kontekstual dan realistis terhadap tujuan serta ukuran kebijakan merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Keterlibatan para pemangku kepentingan serta umpan balik dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas kebijakan.

Oleh karena itu, upaya untuk membuat kebijakan yang tidak hanya bertujuan tinggi, tetapi juga dapat dilaksanakan secara praktis di lapangan, akan sangat menentukan dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan elemen penting dalam model Van Metter dan Van Horn karena berfungsi sebagai indikator arah dan tingkat perubahan yang diharapkan. Dalam konteks Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan (K3P) di Kabupaten Serang, kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di luar sistem pendidikan formal melalui pembelajaran alternatif yang setara dengan pendidikan dasar dan menengah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 26 ayat 2 dan 3 telah menjelaskan juga bahwasannya Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan secara makro telah dipahami, pada level pelaksana masih ditemukan variasi dalam pemaknaan atas tujuan tersebut. Misalnya, sebagian pelaksana menganggap bahwa

program K3P hanya bertujuan untuk “mengurangi angka putus sekolah,” sementara yang lain menekankan pada “pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif secara ekonomi.”

Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan salah satu pengelola PKBM di Kecamatan Tanara:

“Kita di sini lebih menekankan pada keterampilan. Kalau cuma lulus paket kan ya sama saja, jadi kita tambahkan pelatihan kerja agar mereka bisa mandiri setelahnya.” (Wawancara, Pengelola PKBM Tanara, 2025).

Namun demikian, adanya ketidakjelasan indikator kinerja yang baku menyebabkan para pelaksana lebih mengandalkan pengalaman dan intuisi dibandingkan instrumen penilaian yang terstandar. Hal ini memperkuat temuan bahwa ukuran kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem operasional pelaksana.

Analisis menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan K3P masih bersifat makro dan belum terjabarkan menjadi indikator yang operasional di tingkat pelaksana. Dalam teori Van Metter dan Van Horn, ukuran kebijakan yang ambigu dapat menimbulkan variasi dalam interpretasi, dan ini terbukti terjadi di Kabupaten Serang. Variasi pemaknaan ini tidak hanya menyebabkan kesenjangan implementasi antar wilayah, namun juga menciptakan ketimpangan hasil.

Dalam konteks ini, terdapat kelemahan dalam mekanisme "*policy translation*" dari pusat ke daerah. Penyusunan indikator keberhasilan masih mengandalkan angka partisipasi dan kelulusan, tanpa menilai aspek substansi seperti peningkatan keterampilan hidup (*life skills*) dan integrasi sosial. Hal ini memperkuat argumen

Grindle (1980) bahwa ukuran kebijakan yang tidak disesuaikan dengan kondisi lokal akan berakhir sebagai dokumen normatif tanpa dampak transformatif.

2. Sumber daya

Dalam model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, variabel sumber daya diidentifikasi sebagai salah satu pilar krusial dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang mencukupi, upaya implementasi cenderung terhambat, bahkan dapat gagal total dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, sumber daya mencakup berbagai aspek yang vital, antara lain sumber daya manusia, dana atau anggaran, sarana dan prasarana, informasi dan data, serta wewenang yang dimiliki para pelaksana kebijakan.

Pertama, sumber daya manusia menjadi faktor fundamental dalam setiap proses implementasi kebijakan. Keberadaan tenaga kerja yang kompeten, berpengalaman, serta memiliki keterampilan yang sesuai sangat menentukan keberhasilan implementasi. Sumber daya manusia yang baik tidak hanya mampu melaksanakan tugas dengan efektif, tetapi juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya, aspek dana atau anggaran juga tak kalah pentingnya. Pembiayaan yang memadai diperlukan untuk mendukung seluruh aktivitas yang terkait dengan implementasi kebijakan. Adanya dana yang cukup akan memastikan bahwa semua rencana dan program yang telah disusun dapat dijalankan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan. Ketidacukupan anggaran dapat

menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan, yang pada gilirannya akan memengaruhi hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang cermat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik.

Aspek berikutnya adalah sarana dan prasarana, yang mencakup fasilitas fisik, peralatan, teknologi, dan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk mendukung kegiatan implementasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan memungkinkan pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara efisien dan efektif. Dengan fasilitas yang memadai, pelaksana dapat lebih mudah melakukan tugasnya dan menciptakan dampak yang signifikan.

Selain itu, informasi dan data juga merupakan komponen krusial dalam proses implementasi. Pengetahuan yang tepat dan relevan diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengumpulan dan analisis data yang akurat akan membantu pelaksana dalam merumuskan kebijakan yang tepat, serta menilai kemajuan implementasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan data dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan transparansi.

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan yang efektif dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, analisis dan perencanaan yang menyeluruh terhadap setiap elemen sumber daya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan..

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya yang relevan. Oleh karena itu, implementasi yang efektif memerlukan perencanaan yang matang tentang bagaimana sumber daya akan dialokasikan dan digunakan. Sumber daya yang tidak memadai dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan moral pelaksana, sehingga dapat menghambat proses implementasi.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar stakeholder serta komunikasi yang efektif dalam penggunaan sumber daya, agar setiap elemen implementasi saling mendukung untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan ini juga bergantung pada karakteristik organisasi pelaksana yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

Dengan demikian, peran sumber daya dalam implementasi kebijakan tidak dapat diremehkan. Hubungan antar lembaga yang baik, komunikasi, dan koordinasi merupakan aspek penting yang memungkinkan mobilisasi sumber daya dengan lebih efisien. Kesalahan dalam alokasi atau penggunaan sumber daya dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku kepentingan untuk menyusun strategi implementasi yang lebih baik. Dengan demikian, untuk memastikan keberhasilan suatu kebijakan, penting bagi para pembuat kebijakan untuk memperhitungkan kesiapan dan ketersediaan sumber daya yang akan digunakan dalam proses implementasinya.

Dalam konteks Program K3P di Kabupaten Serang, sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, dana, fasilitas, serta informasi dan pelatihan.

Dari aspek SDM, mayoritas PKBM mengandalkan tutor berstatus honorer dengan insentif yang sangat terbatas. Hal ini berdampak pada motivasi dan kualitas layanan pembelajaran. Seorang tutor pendidikan kesetaraan di Kecamatan Padarincang mengungkapkan:

“Kami dibayar Rp300.000 per bulan. Kadang kalau belum cair ya kami tetap mengajar karena kasihan sama peserta. Tapi kalau terus begini, ya berat.” (Wawancara, Tutor Pendidikan Kesetaraan, 2025).

Keterbatasan dana juga berimbas pada terbatasnya fasilitas belajar. Banyak PKBM tidak memiliki ruang kelas permanen, sehingga proses pembelajaran dilakukan di balai desa atau rumah-rumah warga secara bergantian. Hal ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pembelajaran, tetapi juga semangat belajar warga.

Sementara itu, pelatihan bagi pelaksana dan tutor masih sangat terbatas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menyebutkan:

“Kami berupaya memberikan pelatihan minimal satu kali dalam setahun, tapi memang anggaran sangat terbatas. Untuk K3P ini, prioritas kami masih pada pemenuhan modul dan penyusunan kurikulum.” (Wawancara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, 2025).

Salah satu titik lemah paling nyata dalam implementasi Program K3P adalah keterbatasan sumberdaya. Secara teoritis, Van Metter dan Van Horn menekankan pentingnya dukungan sumberdaya sebagai syarat minimal implementasi kebijakan

yang efektif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberlangsungan program lebih banyak bertumpu pada komitmen individu ketimbang sistem pendukung.

Minimnya insentif bagi tutor berbanding lurus dengan menurunnya motivasi jangka panjang. Ketergantungan pada dana APBD dan ketidakkonsistenan distribusinya menjadikan kegiatan PKBM tidak berkelanjutan. Di sisi lain, ketidaksetaraan akses terhadap pelatihan menjadikan kualitas pelaksana sangat bergantung pada pengalaman pribadi.

Analisis ini menegaskan bahwa tanpa penguatan ekosistem pendukung, kebijakan K3P hanya menjadi beban administratif tahunan. Dalam kerangka kebijakan publik, ini menunjukkan terjadinya “implementation gap” yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan kapasitas pelaksana di lapangan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn merujuk pada atribut dan sikap individu atau kelompok yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Karakteristik ini sangat memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Beberapa aspek yang termasuk dalam karakteristik agen pelaksana antara lain adalah kompetensi, motivasi, disposisi terhadap kebijakan yang dijalankan, atribut personal, serta pengalaman yang dimiliki. Semua faktor ini menjadikan karakteristik agen

pelaksana sebagai elemen yang kritis dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Salah satu aspek penting dari karakteristik agen pelaksana adalah kompetensi atau keahlian yang dimiliki. Agen pelaksana yang kompeten dengan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan konteksnya akan lebih mampu menjalankan tugas mereka secara efektif. menegaskan bahwa individu dengan latar belakang yang sesuai dan keterampilan yang relevan berkontribusi besar terhadap suksesnya suatu implementasi kebijakan.. Tanpa adanya keahlian yang memadai, baik dalam hal manajerial maupun teknis, pelaksanaan kebijakan dapat mengalami kekacauan dan bahkan kegagalan, yang pada akhirnya akan menghalangi pencapaian tujuan yang diharapkan.

Karakteristik agen pelaksana juga dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam menjalankan tugas serupa sebelumnya. Mereka yang memiliki pengalaman positif dalam pelaksanaan kebijakan sebelumnya lebih mungkin untuk menerapkan praktik terbaik dan menghindari kesalahan yang sama. Dalam konteks ini, penting bagi organisasi yang terlibat dalam kebijakan publik untuk memberikan kesempatan bagi agen pelaksana untuk belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga dapat meningkatkan kapasitas implementasi mereka.

Dengan demikian, karakteristik agen pelaksana bukan hanya sekadar mencerminkan kemampuan individu di dalam organisasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana faktor psikologis dan sosial berinteraksi dalam proses implementasi kebijakan. Membangun tim pelaksana yang kuat dengan kompetensi yang sesuai,

disposisi yang positif, dan pengalaman yang relevan akan membantu memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, analisis dan pengembangan karakteristik agen pelaksana menjadi elemen penting dalam setiap upaya perbaikan implementasi kebijakan.

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur, kapasitas organisasi, serta budaya kerja lembaga. PKBM sebagai ujung tombak pelaksanaan program K3P di Kabupaten Serang menunjukkan keragaman dalam karakteristik organisasinya. Beberapa PKBM memiliki struktur organisasi yang baik, lengkap dengan manajemen keuangan dan pelaporan kegiatan secara digital, namun sebagian besar lainnya masih mengandalkan pencatatan manual dan belum sepenuhnya terdigitalisasi.

Ketua PKBM di Kecamatan Kragilan menyatakan:

“Kami sebenarnya siap untuk digitalisasi, tapi perangkat dan SDM-nya belum memadai. Masih banyak yang gptek, jadi ya pakai buku catatan.” (Wawancara, Ketua PKBM Kragilan, 2025).

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh karakter personal pelaksana. Mereka yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat mampu menggerakkan program meskipun dengan keterbatasan. Hal ini menunjukkan pentingnya kapasitas individu sebagai elemen pelengkap kapasitas organisasi.

Karakteristik agen pelaksana sangat menentukan derajat keberhasilan implementasi. Berdasarkan hasil wawancara, PKBM dengan struktur organisasi

yang rapi, pemimpin yang visioner, dan jaringan sosial yang luas cenderung lebih sukses mengimplementasikan program. Sebaliknya, PKBM yang lemah dalam manajemen dan tertutup terhadap kolaborasi sering mengalami stagnasi.

Secara teoritis, ini konsisten dengan pandangan Van Metter dan Van Horn bahwa kapasitas organisasi pelaksana menjadi kunci keberhasilan. Namun, dalam konteks Kabupaten Serang, karakteristik agen pelaksana juga sangat dipengaruhi oleh ekosistem sosial-politik lokal. Kuat atau lemahnya relasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan sangat memengaruhi daya gerak lembaga.

Karena itu, pendekatan penguatan kelembagaan harus disertai dengan pelibatan aktor-aktor lokal sebagai mitra strategis. Tanpa dukungan lingkungan sosial, PKBM akan sulit berkembang meskipun memiliki struktur formal yang baik.

4. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Sikap ini mencakup disposisi, keyakinan, serta perasaan yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sikap pelaksana dapat berpengaruh langsung terhadap cara kebijakan dijalankan dan bagaimana respon mereka terhadap tantangan yang mungkin dihadapi. Sikap positif dan keterlibatan aktif agen pelaksana sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang konstruktif serta mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Salah satu aspek dari sikap pelaksana adalah komitmen terhadap kebijakan yang diterapkan. sikap pelaksana yang baik, termasuk komitmen dan motivasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sangat penting dalam menghadapi beragam tantangan implementasi kebijakan. Ketika pelaksana memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebijakan, mereka cenderung lebih proaktif dalam mencari solusi atas masalah yang muncul selama proses implementasi. Ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana bukan hanya sekadar tentang pelaksanaan tugas, tetapi juga mencerminkan dedikasi mereka dalam mewujudkan tujuan yang lebih besar.

Di sisi lain, sikap pelaksana juga dapat berisiko menjadi penghalang bagi implementasi jika ada ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut. agen pelaksana yang skeptis atau tidak percaya pada kebijakan yang diimplementasikan dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Komunikasi yang terbuka dan partisipatif antara pelaksana dan pembuat kebijakan, seperti yang diusulkan dalam berbagai studi, dapat membantu memperbaiki sikap dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi pelaksana untuk memberikan masukan dan umpan balik dapat menjadi langkah krusial dalam mengatasi perbedaan pandangan dan meningkatkan sikap positif terhadap kebijakan.

Sikap pelaksana juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti lingkungan sosial dan politik, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung pekerjaan mereka. Dalam konteks kebijakan publik, jika pelaksana merasakan

adanya dukungan yang cukup dari lingkungan mereka, hal ini cenderung mendorong sikap positif dalam pelaksanaan..

Dengan demikian, sikap pelaksana memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses implementasi kebijakan. Memahami dan menerapkan strategi untuk mempengaruhi sikap pelaksana agar positif dan konstruktif menjadi aspek penting dalam merancang kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana menjadi kunci untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sukses, dengan menjalin komunikasi yang baik dan memastikan adanya dukungan yang cukup dari berbagai pihak.

Sikap pelaksana dalam model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Sikap ini mencakup disposisi, keyakinan, serta perasaan yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sikap pelaksana dapat berpengaruh langsung terhadap cara kebijakan dijalankan dan bagaimana respon mereka terhadap tantangan yang mungkin dihadapi. Sikap positif dan keterlibatan aktif agen pelaksana sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang konstruktif serta mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Salah satu aspek dari sikap pelaksana adalah komitmen terhadap kebijakan yang diterapkan. sikap pelaksana yang baik, termasuk komitmen dan motivasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sangat penting dalam menghadapi beragam tantangan implementasi kebijakan. Ketika pelaksana memiliki rasa

tanggung jawab yang tinggi terhadap kebijakan, mereka cenderung lebih proaktif dalam mencari solusi atas masalah yang muncul selama proses implementasi. Ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana bukan hanya sekadar tentang pelaksanaan tugas, tetapi juga mencerminkan dedikasi mereka dalam mewujudkan tujuan yang lebih besar.

Di sisi lain, sikap pelaksana juga dapat berisiko menjadi penghalang bagi implementasi jika ada ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut. Menurut Daniar et al., agen pelaksana yang skeptis atau tidak percaya pada kebijakan yang diimplementasikan dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.. Komunikasi yang terbuka dan partisipatif antara pelaksana dan pembuat kebijakan, seperti yang diusulkan dalam berbagai studi, dapat membantu memperbaiki sikap dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi pelaksana untuk memberikan masukan dan umpan balik dapat menjadi langkah krusial dalam mengatasi perbedaan pandangan dan meningkatkan sikap positif terhadap kebijakan.

Sikap pelaksana juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti lingkungan sosial dan politik, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung pekerjaan mereka. Dalam konteks kebijakan publik, jika pelaksana merasakan adanya dukungan yang cukup dari lingkungan mereka, hal ini cenderung mendorong sikap positif dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, sikap pelaksana memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses implementasi kebijakan. Memahami dan menerapkan strategi untuk

mempengaruhi sikap pelaksana agar positif dan konstruktif menjadi aspek penting dalam merancang kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana menjadi kunci untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sukses, dengan menjalin komunikasi yang baik dan memastikan adanya dukungan yang cukup dari berbagai pihak.

Sikap pelaksana kebijakan mencerminkan komitmen, keyakinan, dan respons terhadap kebijakan. Di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar tutor dan pengelola PKBM menunjukkan dedikasi tinggi, meskipun insentif tidak memadai. Dedikasi ini berasal dari nilai-nilai personal dan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Salah satu tutor keaksaraan menyampaikan:

“Saya sendiri dulu tidak sekolah, tapi sekarang bisa mengajar orang lain membaca. Itu kebanggaan bagi saya.” (Wawancara, Tutor Keaksaraan, 2025).

Namun, tidak semua pelaksana memiliki sikap positif. Terdapat pula pelaksana yang hanya menjalankan program karena tuntutan administratif, tanpa semangat transformasi sosial. Hal ini berdampak pada minimnya inovasi dan rendahnya retensi peserta didik.

Sikap pemerintah daerah juga turut berpengaruh. Bila kepala desa atau camat memiliki komitmen terhadap pendidikan nonformal, maka dukungan logistik dan moral akan lebih kuat. Di desa-desa yang kurang memiliki dukungan politik, pelaksanaan program K3P menjadi stagnan.

Sikap pelaksana mencerminkan motivasi intrinsik dan persepsi terhadap relevansi kebijakan. Dari temuan penelitian, terlihat bahwa pelaksana dengan latar belakang sebagai penyintas pendidikan atau aktivis literasi cenderung memiliki dedikasi tinggi. Namun, pelaksana yang direkrut hanya karena alasan administratif menunjukkan sikap minimalis terhadap program.

Dalam kerangka Van Metter dan Van Horn, sikap pelaksana sangat dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan, ketersediaan dukungan, dan legitimasi sosial dari program. Ketika kebijakan tidak dirasa penting oleh masyarakat, pelaksana pun akan merasa bekerja tanpa makna.

Implikasinya, dibutuhkan proses “internalisasi kebijakan” melalui pelatihan berbasis nilai dan pembentukan komunitas praktisi (*community of practice*). Dengan cara ini, pelaksana tidak hanya menjadi “pelaksana teknis”, tetapi juga “agen perubahan” di komunitas mereka.

5. Komunikasi Antarorganisasi

Dalam konteks model implementasi berdasarkan Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi berfungsi sebagai variabel kritis yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi implementasi suatu kebijakan atau program. Komunikasi ini mencakup pengaturan interaksi antara organisasi yang berbeda, serta menciptakan saluran untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama

Dalam praktiknya, komunikasi antar organisasi dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk rapat, dokumentasi, dan *platform digital* yang memungkinkan pertukaran informasi secara *real-time*. Menurut penelitian, frekuensi dan kualitas komunikasi yang tinggi di antara organisasi berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja proyek yang sedang dijalankan. Konsep ini menekankan betapa pentingnya keterbukaan dan kolaborasi dalam jaringan organisasi, di mana manajer perlu membangun mekanisme formal untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan koordinasi antara *entitas* yang terlibat

Komunikasi antar organisasi juga berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan kebingungan di kalangan tenaga kerja terkait tujuan dan ekspektasi organisasi. Hal ini sangat penting dalam konteks organisasi yang memiliki misi kompleks atau ketika menghadapi situasi yang dinamis. Penelitian telah menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antar organisasi dapat menghasilkan hasil implementasi yang lebih baik dan merespons lebih cepat terhadap tantangan yang muncul dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Tidak kalah pentingnya, komunikasi yang efektif di antara organisasi dapat memainkan peran dalam mengurangi konflik dan membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Di satu sisi, ketidakcocokan dalam *perspektif* dan pemahaman dapat menyebabkan ketegangan, tetapi dengan mengembangkan saluran komunikasi yang baik, organisasi dapat bekerja secara sinergis untuk menyelesaikan konflik dan mencapai hasil yang diinginkan. Ini menunjukkan

bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya bergantung pada struktur formal dan prosedur yang ada, tetapi juga pada kualitas interaksi antar organisasi

Secara keseluruhan, komunikasi antar organisasi merupakan komponen vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program. Ia memungkinkan adanya saling pengertian yang lebih baik, membangun jaringan kolaboratif yang kuat, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi dan perkembangan berkelanjutan di antara berbagai pihak yang terlibat.

Komunikasi antarorganisasi dalam model Van Metter dan Van Horn berfungsi sebagai sarana koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks Program K3P di Kabupaten Serang, komunikasi antara Dinas Pendidikan, PKBM, tutor, dan pemangku kepentingan lokal masih mengalami sejumlah kendala.

Secara struktural, komunikasi *vertikal* antara Dinas Pendidikan Kabupaten dengan PKBM dilakukan melalui surat edaran, rapat koordinasi tahunan, serta pelaporan berkala. Namun, di level operasional, informasi seringkali tidak tersampaikan secara utuh atau terlambat. Banyak tutor mengaku tidak mengetahui perubahan kurikulum atau standar penilaian karena tidak diikutkan dalam forum komunikasi tersebut.

Seorang tutor pendidikan kesetaraan di Kecamatan Padarincang mengungkapkan:

“Kami baru tahu kalau ada revisi modul Paket B setelah peserta kami ikut ujian. Padahal itu sangat penting karena berkaitan dengan materi ajar.” (Wawancara, Tutor Paket B, 2025).

Di sisi lain, komunikasi horizontal antara PKBM juga belum terbangun sebagai ekosistem kolaboratif. Tidak ada forum resmi antar-PKBM untuk berbagi praktik baik atau menyusun strategi bersama. Padahal, kolaborasi lintas lembaga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan memperkuat kapasitas kolektif.

Pengelola PKBM di Kecamatan Tanara menyatakan:

“Kita sama-sama jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau kita bareng bisa ajak tutor dari PKBM lain buat pelatihan bersama, atau pinjam fasilitas.” (Wawancara, Ketua PKBM Tanara, 2025).

Lebih lanjut, relasi antara PKBM dan pemerintah desa juga sangat bergantung pada relasi personal, bukan institusional. Bila kepala desa aktif mendukung, PKBM mendapat akses pada balai desa, dana desa, bahkan rekomendasi peserta. Namun, bila tidak, maka pelaksanaan program berjalan tersendat.

Kepala PKBM di Kecamatan Padarincang menyatakan:

“Alhamdulillah kepala desa kami mendukung. Setiap ada rapat RT, beliau umumkan soal program keaksaraan. Itu sangat membantu.” (Wawancara, Kepala PKBM Padarincang, 2025).

Sebaliknya, di desa lain, pelaksana mengeluh:

“Kami tidak bisa pakai aula desa karena katanya harus bayar. Padahal ini untuk warga juga.” (Wawancara, Tutor Keaksaraan, 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi masih bersifat *sporadis* dan belum terlembaga. Hal ini menjadi hambatan serius dalam efektivitas pelaksanaan program.

Kelemahan dalam komunikasi antarorganisasi tampak dari tidak adanya platform komunikasi reguler antara Dinas Pendidikan, PKBM, dan mitra lokal. Hal

ini menyebabkan informasi strategis sering tertahan di level struktural dan tidak menjangkau pelaksana operasional.

Dalam teori Van Metter dan Van Horn, komunikasi yang efektif harus menjamin bahwa informasi bergerak secara vertikal dan horizontal. Dalam kasus Kabupaten Serang, saluran komunikasi vertikal cukup aktif, namun komunikasi horizontal nyaris tidak terbangun. Tidak adanya forum PKBM lintas wilayah menyebabkan isolasi kelembagaan dan rendahnya pertukaran inovasi.

Situasi ini menimbulkan efek negatif berupa “*fragmentasi* pelaksanaan kebijakan” di mana setiap PKBM berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Maka, strategi membangun forum koordinasi atau asosiasi PKBM sangat diperlukan untuk memperkuat komunikasi *horizontal* dan jejaring sosial.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam konteks lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Masing-masing variabel ini memiliki peranan krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Pertama, lingkungan ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan melalui ketersediaan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan. Tanpa dukungan ekonomi yang cukup, banyak kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Faktor lingkungan eksternal, termasuk kondisi ekonomi, menjadi determinan utama dalam menilai kinerja implementasi kebijakan. Penyelenggara kebijakan harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi yang ada serta memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.

Selanjutnya, lingkungan sosial berperan dalam mengatur hubungan antara para pelaksana kebijakan dan masyarakat. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan baru dapat diterima dan diimplementasikan dengan sukses.

Terakhir, lingkungan politik menyediakan konteks dalam implementasi kebijakan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan dan tindakan pelaksana. Dalam konteks ini, ketidakpastian politik dan perubahan kebijakan bisa menjadi penghambat yang signifikan. Lingkungan politik yang mendukung mampu menciptakan suasana kondusif bagi implementasi kebijakan, sedangkan faktor ketidakpastian atau konflik politik cenderung membawa dampak negatif.

Lingkungan *eksternal* memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dinyatakan dalam model Van Metter dan Van Horn. Dalam studi ini, kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kabupaten Serang sangat memengaruhi pelaksanaan K3P.

Secara ekonomi, banyak peserta didik pada program kesetaraan dan keaksaraan berasal dari kelompok marginal. Mereka bekerja di sektor informal seperti buruh tani, nelayan, pedagang kecil, atau pekerja rumah tangga. Konsekuensinya, waktu belajar mereka sangat terbatas karena harus bekerja untuk kebutuhan harian.

Seorang peserta didik keaksaraan di Kecamatan Kragilan berkata:

“Saya kerja di pasar. Pulang sore, ngurus anak, baru malam bisa belajar. Kadang ngantuk banget.” (Wawancara, Peserta Keaksaraan, 2025).

Karena itu, pelaksanaan pembelajaran lebih sering dilakukan malam hari atau akhir pekan. Namun ini membawa tantangan tambahan berupa keterbatasan penerangan, keamanan, dan kesiapan tutor.

Di sisi sosial, *stigma* terhadap pendidikan nonformal masih menjadi penghalang. Beberapa orang tua atau warga memandang PKBM sebagai "sekolah kelas dua." Ini berdampak pada rendahnya partisipasi awal dan tingginya angka putus belajar.

Kepala PKBM di Kecamatan Kragilan mengungkapkan:

“Banyak yang bilang, buat apa belajar kalau cuma lulus Paket C? Mending kerja. Ini yang harus kita rubah pelan-pelan.” (Wawancara, Kepala PKBM Pamarayan, 2025).

Di sisi politik, komitmen pemerintah daerah terlihat dari alokasi anggaran rutin untuk PKBM, meski masih terbatas. Namun kebijakan ini belum cukup didukung oleh regulasi turunan yang jelas, seperti petunjuk teknis atau insentif khusus untuk tutor dan PKBM yang berkinerja baik.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, dalam salah satu audiensi yang dikutip, menyatakan:

“Kami mendukung pendidikan nonformal, tapi harus ada parameter yang jelas. Jangan sampai anggaran hanya terserap tanpa capaian.” (Wawancara, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, 2025).

Dari sisi sosial-politik, muncul pula pengaruh organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat. Di desa-desa yang kuat unsur pesantren atau majelis taklim, program keaksaraan mendapat dukungan lebih karena disinergikan dengan pengajian. Namun di daerah lain yang tidak memiliki struktur sosial yang *kohesif*, partisipasi sulit dibangun.

Lingkungan eksternal merupakan salah satu variabel yang tidak dapat dikontrol oleh pelaksana, namun sangat mempengaruhi hasil implementasi. Kondisi ekonomi masyarakat peserta program yang berada dalam kemiskinan struktural menjadikan pendidikan sebagai prioritas sekunder.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan K3P belum memiliki strategi komplementer untuk mengatasi kendala struktural ini. Misalnya, belum ada integrasi antara program K3P dengan program pengentasan kemiskinan atau bantuan sosial. Akibatnya, peserta didik kesetaraan tetap berhadapan dengan tekanan ekonomi harian yang tinggi.

Dari sisi sosial, *stigma* terhadap pendidikan nonformal masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan pendekatan administratif, tetapi juga pendekatan kultural dan sosiologis. Kampanye sosial yang berkelanjutan serta keterlibatan tokoh lokal sangat penting dalam membentuk opini publik yang lebih positif terhadap program.

Dalam konteks politik lokal, fluktuasi komitmen pemangku kebijakan berdampak besar. Bila kepala desa atau camat tidak mendukung, maka program akan berjalan stagnan. Maka, desentralisasi kebijakan harus disertai dengan advokasi politik yang kuat untuk membangun dukungan jangka panjang.

4.4.1. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memegang peranan krusial dalam menyediakan akses pendidikan non-formal dan keterampilan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh jalur pendidikan formal. Namun, seringkali

PKBM menghadapi kendala serius berupa kekurangan sarana dan prasarana, yang secara langsung menghambat efektivitas program dan kualitas pembelajaran. Kekurangan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari ketiadaan ruang belajar yang memadai, minimnya peralatan praktikum, hingga akses terbatas terhadap teknologi informasi. Dampaknya sangat terasa, yaitu menurunnya minat belajar masyarakat, terbatasnya variasi program yang dapat ditawarkan, dan pada akhirnya, terhambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Untuk mengatasi masalah ini secara holistik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menggalakkan kolaborasi multipihak. Pemerintah daerah, melalui dinas pendidikan terkait, harus memimpin inisiatif ini dengan memetakan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap PKBM. Data ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan proposal kepada berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), organisasi nirlaba, serta individu-individu yang peduli terhadap pendidikan. Kolaborasi ini dapat berbentuk sumbangan dana, penyediaan peralatan bekas yang masih layak pakai, atau bahkan pembangunan fasilitas secara gotong royong. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, beban pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dapat didistribusikan, sehingga tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah yang terbatas.

Selain kolaborasi, inovasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal juga merupakan strategi yang sangat efektif. PKBM dapat memanfaatkan bangunan atau lahan kosong yang tidak terpakai di sekitar lingkungan mereka, seperti balai desa, posyandu, atau bahkan rumah warga yang bersedia. Pemanfaatan ruang publik atau

fasilitas umum yang tersedia juga bisa menjadi solusi sementara atau permanen. Dalam hal peralatan, PKBM dapat mendorong pengembangan media pembelajaran berbasis bahan daur ulang atau barang bekas yang mudah ditemukan. Misalnya, untuk pembelajaran keterampilan, bisa digunakan bahan-bahan sisa industri rumahan atau kerajinan tangan. Pendekatan ini tidak hanya ekonomis tetapi juga dapat menumbuhkan kreativitas dan kesadaran lingkungan di kalangan peserta didik.

Selanjutnya, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) menjadi kunci untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran di PKBM. Meskipun seringkali terkendala keterbatasan dana, pemerintah dan pihak terkait dapat memfasilitasi akses internet gratis atau subsidi di area PKBM. Pelatihan bagi pengelola dan tutor PKBM dalam pemanfaatan platform pembelajaran daring, aplikasi edukasi, atau bahkan pengembangan konten digital sederhana juga sangat penting. Dengan demikian, meskipun sarana fisik terbatas, peserta didik tetap dapat mengakses materi pembelajaran yang kaya dan beragam melalui perangkat digital yang mungkin sudah mereka miliki atau melalui fasilitas bersama yang disediakan. Terakhir, keberlanjutan solusi-solusi ini akan sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PKBM. Pelatihan berkelanjutan bagi pengelola dan tutor PKBM dalam manajemen aset, perawatan fasilitas, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan ketersediaan sarana sangat diperlukan. Adanya sistem inventarisasi dan pemeliharaan yang baik akan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang sudah ada dapat bertahan lebih lama dan berfungsi optimal. Dengan strategi yang komprehensif, melibatkan kolaborasi,

inovasi pemanfaatan sumber daya, adopsi teknologi, dan penguatan kapasitas, kekurangan sarana dan prasarana di PKBM dapat diatasi secara bertahap, sehingga PKBM dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.4.2. Banyaknya PKBM yang Belum Terakreditasi dan Akreditasi C

Kondisi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Serang yang banyak belum terakreditasi atau baru memiliki akreditasi C disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman dan persiapan akreditasi oleh pengelola PKBM. sosialisasi dan persiapan akreditasi sangat penting bagi PKBM dalam menilai kelayakan layanan pendidikan yang mereka tawarkan, mengingat adanya standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui kebijakan akreditasi yang mengharuskan PKBM untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditentukan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan non-formal yang memiliki peran vital dalam memberikan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Namun, pemerataan PKBM di seluruh wilayah Kabupaten Serang memang masih menjadi tantangan. Ada beberapa faktor yang kemungkinan besar berkontribusi pada kondisi ini:

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Serang:

Wilayah yang Luas dan Beragam: Kabupaten Serang memiliki wilayah yang luas dan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari daerah perkotaan, pedesaan, hingga pesisir. Daerah-daerah terpencil atau dengan akses yang sulit akan lebih menantang untuk mendirikan dan mengelola PKBM.

Kepadatan Penduduk Tidak Merata: Konsentrasi penduduk yang tidak merata juga memengaruhi lokasi PKBM. Umumnya, PKBM cenderung berkembang di daerah yang lebih padat penduduk dan memiliki akses yang lebih mudah, sementara daerah dengan populasi jarang mungkin kurang diminati untuk pendirian PKBM.

Persebaran Sasaran Pendidikan Non-Formal: Kebutuhan akan pendidikan non-formal, seperti program kesetaraan (Paket A, B, C), keterampilan, atau pemberdayaan masyarakat, mungkin tidak merata di setiap kecamatan. Daerah dengan angka putus sekolah tinggi atau kebutuhan pelatihan kerja yang spesifik mungkin lebih membutuhkan PKBM.

2. Keterbatasan Sumber Daya:

Sumber Daya Manusia (SDM): Tenaga Pengajar (Tutor): Kekurangan tutor yang berkualitas dan berkomitmen, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala. Tutor PKBM seringkali tidak memiliki gaji tetap yang menarik, sehingga sulit untuk mempertahankan mereka.

Pengelola PKBM: Keterbatasan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki inisiatif, kapasitas manajerial, dan kemauan untuk mengelola PKBM secara berkelanjutan. Mendirikan dan menjalankan PKBM membutuhkan dedikasi dan pemahaman yang mendalam tentang pendidikan non-formal.

Sarana dan Prasarana: Gedung dan Fasilitas: Banyak PKBM yang masih menumpang di fasilitas umum (misalnya balai desa, mushola) atau memiliki bangunan yang kurang representatif. Keterbatasan sarana belajar, seperti buku, alat peraga, atau komputer, juga menjadi masalah.

Akses Teknologi: Di era digital, ketersediaan akses internet dan perangkat teknologi sangat penting untuk pembelajaran. Daerah yang belum terjangkau internet atau memiliki infrastruktur telekomunikasi yang buruk akan kesulitan mengembangkan PKBM berbasis teknologi.

Pendanaan: Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk pendidikan non-formal, khususnya PKBM, mungkin masih terbatas dibandingkan dengan pendidikan formal. **Kemandirian PKBM:** Banyak PKBM yang kesulitan dalam mengembangkan kemandirian finansial. Mereka masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah atau donatur, sehingga keberlanjutan programnya menjadi rentan.

Kurangnya Partisipasi Swasta/Masyarakat: Peran serta swasta atau masyarakat dalam memberikan dukungan finansial atau fasilitas untuk PKBM masih perlu ditingkatkan.

3. Regulasi dan Kebijakan:

Proses Perizinan dan Pendirian: Meskipun pemerintah mendorong pendirian PKBM, proses perizinan yang rumit atau birokrasi yang panjang dapat menjadi hambatan bagi inisiator.

Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan, pemerintah desa, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendorong dan membina PKBM di setiap wilayah.

Kewenangan dan Pembinaan: Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal dari pemerintah daerah terhadap PKBM, sehingga banyak PKBM yang berjuang sendiri tanpa dukungan yang memadai.

4. Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:

Rendahnya Kesadaran Pentingnya Pendidikan Non-Formal: Di beberapa daerah, masyarakat mungkin masih belum sepenuhnya memahami pentingnya PKBM sebagai alternatif untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan.

Prioritas Ekonomi: Masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau yang kondisi ekonominya kurang, mungkin lebih memprioritaskan pekerjaan daripada mengikuti program pendidikan di PKBM, meskipun program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

Faktor Sosial Budaya: Adanya faktor sosial budaya yang mungkin kurang mendukung aktivitas belajar di luar jalur formal, atau adanya pandangan bahwa pendidikan formal lebih utama.

5. Tantangan dalam Pengelolaan dan Program PKBM:

Manajemen PKBM yang Beragam: Kualitas manajemen PKBM sangat bervariasi. Ada PKBM yang dikelola secara profesional, namun banyak juga yang masih dikelola secara sederhana dengan kapasitas SDM yang terbatas.

Kurikulum dan Relevansi Program: Program-program yang ditawarkan PKBM harus relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dunia kerja. Jika

program tidak menarik atau tidak memberikan manfaat langsung, minat masyarakat untuk bergabung akan rendah.

Promosi dan Sosialisasi: Kurangnya upaya promosi dan sosialisasi yang efektif tentang keberadaan dan manfaat PKBM kepada masyarakat luas, terutama di daerah-daerah terpencil.

Untuk mengatasi permasalahan pemerataan PKBM di Kabupaten Serang, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan akademisi. Ini bisa meliputi peningkatan alokasi anggaran, pelatihan SDM, fasilitasi sarana prasarana, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan sosialisasi tentang pentingnya PKBM.

Sosialisasi dan persiapan akreditasi yang kurang masif dan terstruktur juga memainkan peran penting dalam kondisi ini. Meskipun ada standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tampaknya informasi mengenai kebijakan akreditasi dan bagaimana cara memenuhinya belum tersampaikan secara merata dan efektif kepada seluruh PKBM di Kabupaten Serang. Banyak PKBM mungkin tidak mendapatkan bimbingan yang memadai mengenai langkah-langkah konkret yang harus mereka ambil untuk meningkatkan kualitas layanan mereka agar sesuai dengan SNP. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tuntutan standar dan kapasitas PKBM untuk memenuhinya.

Ketidaksesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi dasar akreditasi adalah bukti nyata dari permasalahan di atas. SNP mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan dan pembiayaan. PKBM yang belum terakreditasi atau hanya

mendapatkan akreditasi C seringkali memiliki kekurangan di beberapa atau bahkan semua aspek ini. Misalnya, fasilitas yang tidak memadai, kualifikasi pengajar yang belum memenuhi standar, atau manajemen administrasi yang kurang tertata. Semua ini secara langsung memengaruhi penilaian akreditasi mereka.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, perlu meningkatkan program sosialisasi dan pendampingan akreditasi yang lebih intensif dan terarah. Pemberian pelatihan mengenai penyusunan dokumen, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pengelolaan kelembagaan akan sangat membantu PKBM. Selain itu, kolaborasi antara PKBM dengan lembaga-lembaga pendidikan lain atau pihak swasta juga dapat menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memenuhi standar akreditasi dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas pendidikan non-formal di Kabupaten Serang.

4.4.3. Keberadaan Lembaga PKBM Beum Merata

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran vital dalam menyediakan akses pendidikan non-formal dan keterampilan di Kabupaten Serang. Namun, disayangkan, persebaran PKBM di wilayah ini belum merata, meninggalkan beberapa daerah dengan akses terbatas terhadap layanan pendidikan krusial ini. Ada banyak faktor kompleks yang berkontribusi pada ketidakmerataan ini, mulai dari aspek geografis hingga tantangan kelembagaan yang perlu diurai satu per satu.

Salah satu faktor utama adalah geografis dan demografis Kabupaten Serang yang beragam. Kabupaten Serang memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik

geografis yang berbeda-beda, mulai dari daerah perkotaan yang padat hingga pedesaan terpencil, bahkan ada area pesisir. Daerah-daerah terpencil, dengan akses jalan yang sulit dan populasi yang menyebar, seringkali menjadi tantangan tersendiri untuk pendirian dan operasional PKBM. Minimnya infrastruktur dasar seperti listrik dan internet di beberapa wilayah juga menjadi hambatan serius. Akibatnya, PKBM cenderung terkonsentrasi di wilayah yang lebih mudah dijangkau dan padat penduduk.

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga menjadi kendala signifikan. Meskipun pemerintah memiliki komitmen terhadap pendidikan, alokasi dana untuk pengembangan PKBM seringkali terbatas. Dana yang ada mungkin lebih diprioritaskan untuk pendidikan formal atau program-program lain yang dianggap lebih mendesak. Ini berdampak pada minimnya dukungan finansial untuk pendirian PKBM baru, penyediaan fasilitas, atau bahkan operasional PKBM yang sudah ada di daerah-daerah terpencil. Tanpa dukungan dana yang memadai, sulit bagi inisiatif masyarakat untuk membangun dan mempertahankan PKBM secara mandiri.

Selain itu, kurangnya inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat di beberapa wilayah juga menjadi faktor. Pendirian PKBM tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada dorongan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Di beberapa daerah, mungkin kesadaran akan pentingnya pendidikan non-formal masih rendah, atau tidak ada tokoh masyarakat yang berinisiatif untuk menggerakkan pembentukan PKBM. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah di masyarakat tersebut, atau fokus utama mereka yang masih pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi persoalan. PKBM membutuhkan tutor dan pengelola yang kompeten dan berdedikasi. Di daerah-daerah terpencil, seringkali sulit menemukan individu yang memenuhi kualifikasi tersebut dan bersedia mengabdikan diri untuk mengelola PKBM. Faktor ini diperparah dengan minimnya insentif atau dukungan profesional bagi para pengelola dan tutor, sehingga mereka mungkin enggan untuk terlibat atau bertahan dalam jangka panjang.

Regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang belum optimal dalam mendorong pemerataan PKBM juga dapat berkontribusi. Meskipun ada kebijakan umum dari pemerintah pusat, implementasi di tingkat daerah perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Jika tidak ada kebijakan yang secara spesifik mendorong pendirian PKBM di daerah-daerah tertinggal atau terpencil, maka inisiatif tersebut mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Perlu ada peta jalan yang jelas dan program insentif bagi daerah yang berhasil mendirikan dan mengoperasikan PKBM di wilayahnya.

Tantangan lain adalah kurangnya koordinasi antarlembaga. Pengembangan PKBM melibatkan berbagai pihak, mulai dari dinas pendidikan, pemerintah desa, hingga organisasi masyarakat sipil. Jika koordinasi antara lembaga-lembaga ini tidak berjalan efektif, upaya-upaya yang dilakukan bisa terfragmentasi dan tidak mencapai hasil yang optimal. Penting untuk membentuk gugus tugas atau forum koordinasi yang secara khusus membahas pengembangan dan pemerataan PKBM di Kabupaten Serang.

Terakhir, minat dan kebutuhan pendidikan yang bervariasi di setiap wilayah turut mempengaruhi. Di beberapa daerah, masyarakat mungkin lebih membutuhkan program kesetaraan (Paket A, B, C), sementara di daerah lain mungkin lebih dominan kebutuhan akan keterampilan tertentu seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan. Jika program yang ditawarkan PKBM tidak relevan dengan kebutuhan lokal, minat masyarakat untuk bergabung akan rendah, yang pada akhirnya mempengaruhi keberlanjutan operasional PKBM di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pegiat pendidikan untuk melakukan pemetaan kebutuhan yang cermat sebelum mendirikan PKBM di suatu wilayah.

4.4.4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendidikan

Pendidikan adalah fondasi kemajuan suatu bangsa. Namun, di banyak daerah, termasuk di beberapa wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan. Masih banyak keluarga yang menganggap pendidikan sebagai beban atau prioritas sekunder dibandingkan kebutuhan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan pendekatan yang berkelanjutan, menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Langkah pertama adalah mengintensifkan kampanye sosialisasi dan advokasi yang masif dan berkelanjutan. Kampanye ini harus dilakukan secara multi-platform, tidak hanya melalui media massa seperti radio lokal atau media sosial, tetapi juga melalui pertemuan tatap muka di tingkat RT/RW, pengajian, arisan, dan acara-acara adat. Materi sosialisasi harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, relevan dengan konteks lokal, dan menyoroti manfaat konkret

pendidikan bagi individu, keluarga, hingga masyarakat secara keseluruhan, baik dari segi peningkatan ekonomi, kesehatan, maupun kualitas hidup.

Selanjutnya, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin adat menjadi kunci penting. Mereka memiliki pengaruh besar dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan menjadikan mereka agen perubahan dan juru bicara pentingnya pendidikan, pesan akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh warga. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, atau lembaga pendidikan, dapat memberikan pelatihan khusus kepada para tokoh ini agar mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai pendidikan dan mampu menyampaikannya secara efektif.

Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta dan organisasi nirlaba juga krusial. Perusahaan melalui program CSR dapat berinvestasi dalam program-program pendidikan, seperti beasiswa, pembangunan fasilitas belajar, atau pelatihan keterampilan. Organisasi nirlaba yang fokus pada pendidikan dapat membantu menyelenggarakan lokakarya, seminar, atau program mentorship yang menunjukkan dampak positif pendidikan secara langsung. Kemitraan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga memperluas jangkauan dan inovasi program peningkatan kesadaran.

Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan lokal akan secara langsung meningkatkan minat masyarakat. Jika masyarakat melihat bahwa pendidikan dapat memberikan keterampilan yang langsung dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau kualitas hidup mereka (misalnya, pelatihan pertanian modern, keterampilan menjahit, atau

pengolahan hasil laut di daerah pesisir), mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. PKBM di Kabupaten Serang dapat menjadi garda terdepan dalam merancang dan melaksanakan program-program semacam ini.

Selain itu, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inklusif sangat penting, terutama bagi anak-anak. Sekolah atau PKBM harus menjadi tempat yang ramah, aman, dan memotivasi. Ini berarti fasilitas yang memadai, guru atau tutor yang peduli dan kreatif, serta metode pembelajaran yang tidak membosankan. Bagi orang tua, penting untuk melihat bahwa anak-anak mereka bahagia dan berkembang di lingkungan pendidikan, yang pada gilirannya akan memperkuat keyakinan mereka akan pentingnya pendidikan.

Membangun jembatan komunikasi antara sekolah/PKBM dengan orang tua dan masyarakat harus menjadi prioritas. Program-program seperti pertemuan orang tua-guru secara rutin, hari terbuka sekolah, atau kegiatan bersama yang melibatkan orang tua dan komunitas dapat mempererat hubungan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dipelajari anak-anak di sekolah. Ini juga menjadi wadah bagi orang tua untuk menyampaikan kekhawatiran dan mendapatkan dukungan.

Pemberian insentif atau penghargaan bagi keluarga yang berkomitmen terhadap pendidikan anak-anaknya dapat menjadi motivator tambahan. Ini bisa berupa bantuan sembako, akses prioritas pada program-program sosial, atau pengakuan publik. Meskipun tidak boleh menjadi satu-satunya motivasi, insentif ini dapat meringankan beban ekonomi dan menunjukkan bahwa pemerintah atau komunitas menghargai upaya mereka dalam mendukung pendidikan.

Terakhir, pendokumentasian dan penyebarluasan kisah sukses (*success stories*) dari individu atau keluarga yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya berkat pendidikan sangat efektif. Kisah-kisah nyata ini dapat menginspirasi dan memberikan bukti konkret bahwa pendidikan memang merupakan investasi jangka panjang yang berharga. Melalui pendekatan yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dapat terus meningkat, membuka peluang lebih besar bagi kemajuan individu dan Kabupaten Serang secara keseluruhan.

4.4. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi Program K3P di Kabupaten Serang, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diakui untuk memberikan ruang refleksi dan rekomendasi bagi studi lanjutan. Pertama, cakupan geografis penelitian terbatas pada kecamatan (Kramatwatu, Padarincang, dan Cinangka) dari total 29 kecamatan di Kabupaten Serang. Keterbatasan ini disebabkan oleh faktor aksesibilitas wilayah terpencil seperti Ciomas dan Pabuaran yang memerlukan waktu tempuh lebih dari 4 jam dari pusat kabupaten. Akibatnya, temuan penelitian mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamika di seluruh wilayah Kabupaten Serang, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosio-kultural yang berbeda.

Kedua, kedalaman waktu penelitian yang hanya mencakup periode Januari-September 2024 membatasi kemampuan peneliti dalam mengukur dampak jangka panjang program, seperti peningkatan pendapatan peserta atau keberlanjutan usaha

yang dibentuk pasca-pelatihan. Sebagian besar data yang dikumpulkan bersifat *snapshot* pada tahap implementasi, sehingga tidak dapat menangkap dinamika perubahan seperti penurunan motivasi peserta atau faktor eksternal (misalnya perubahan kebijakan anggaran) yang mungkin terjadi setelah penelitian berakhir.

Ketiga, keterbatasan akses data sekunder dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Meskipun tim peneliti telah mengajukan permohonan akses ke dokumen anggaran rinci dan catatan evaluasi internal, sebagian data dianggap *confidential* dan hanya disediakan dalam bentuk agregat. Hal ini menyulitkan analisis mendetail tentang alokasi dana per kecamatan atau efektivitas penyerapan anggaran di level *mikro*. Selain itu, data partisipasi kelompok disabilitas tidak tercatat secara sistematis, sehingga peneliti harus mengandalkan wawancara dan observasi lapangan yang mungkin kurang akurat.

Keempat, subjektivitas dalam analisis kualitatif menjadi tantangan tersendiri. Meskipun peneliti telah melakukan triangulasi data (wawancara, observasi, dokumen), interpretasi terhadap fenomena seperti *stigma* sosial atau intervensi politik tetap mengandung bias subjektif, terutama dalam konteks budaya lokal yang kompleks. Misalnya, peserta yang enggan mengkritik program secara terbuka karena khawatir dianggap tidak sopan, atau kecenderungan narasumber dari Dinas Pendidikan untuk menyajikan keberhasilan program tanpa menyoroti kegagalan.

Kelima, keterbatasan partisipasi *stakeholder* kunci. Penelitian ini belum melibatkan perwakilan dunia usaha (seperti UMKM mitra magang) dan LSM pendidikan nasional yang mungkin memiliki *perspektif* berbeda tentang efektivitas program. Selain itu, partisipasi laki-laki dalam wawancara masih rendah (hanya 12 dari 25 peserta), sehingga analisis *gender* mungkin kurang mendalam dalam memahami akar masalah partisipasi laki-laki di program Keaksaraan.

Keenam, ketergantungan pada data *self-report* dari peserta dan tutor berpotensi menghasilkan gambaran yang terlalu optimis atau subjektif. Contohnya, klaim peningkatan pendapatan peserta pelatihan batik di Desa Kramatwatu tidak dapat diverifikasi secara independen karena tidak adanya data penjualan atau catatan keuangan yang terdokumentasi.

Terakhir, konteks politik lokal yang dinamis selama periode penelitian memengaruhi objektivitas data. Pada Agustus 2024, terjadi *reshuffle* jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, yang mengakibatkan perubahan prioritas anggaran dan penundaan sejumlah kegiatan pelatihan. Situasi ini tidak sepenuhnya terantisipasi dalam desain penelitian awal, sehingga memengaruhi konsistensi data yang dikumpulkan.

Meski demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai temuan penelitian, melainkan memberikan arah untuk studi lanjutan. Penelitian mendatang perlu memperluas cakupan geografis, mengadopsi pendekatan longitudinal, serta melibatkan metode *mixed-methods* (kualitatif-kuantitatif) untuk memperkuat *validitas* dan *reliabilitas* data.